Jurnal Dedikasi untuk Negeri
Volume 5 Nomor 1, Juli 2026
Universitas Muhammadiyah Lampung
E-ISSN. 2962-9608
http://journal.uml.ac.id/JDN

PELATIHAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN BUMDES SEBAGAI UPAYA PENGUATAN KAPASITAS MANAJERIAL PENGELOLA BUMDES DI KABUPATEN PESAWARAN

Moh Fakhrurozi[1], **Warsiyah**[2], **Thawap Nasution**[3], **Sevi Andriasari**[4], **Noorikha Pandahesti Saputeri**[5], **Mutiara Sari**[6]

1,4 Institut Teknologi dan Bisnis Diniyyah Lampung
2,5,6 Universitas Muhammadiyah Lampung
3 Institut Maritim Prasetya Mandiri
**Penulis Korespondensi: rozi.afiq2006@gmail.com*

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi pedesaan. Namun, sebelum kegiatan dilaksanakan, permasalahan utama mitra adalah belum tersedianya dokumen rencana bisnis yang sistematis, terukur, dan sesuai dengan potensi usaha desa. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kapasitas manajerial dan teknis pengelola BUMDes di Kabupaten Pesawaran melalui bimbingan teknis penyusunan dokumen rencana bisnis. Kegiatan dilaksanakan pada 20 Agustus 2025 di Kampus Institut Teknologi dan Bisnis Diniyyah Lampung (INSTIDLA) dan diikuti 14 peserta dari tujuh BUMDes: Sukabanjar, Bernung, Wiyono, Pampangan, Kalirejo, Taman Sari, dan Sungai Langka. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Learning melalui pelatihan, diskusi interaktif, dan praktik langsung penyusunan business plan berbasis Business Model Canvas (BMC) dan analisis SWOT. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan rata-rata pemahaman peserta sebesar 39,7%, dari nilai pre-test 62,5 menjadi post-test 87,3. Selain itu, peserta menghasilkan draft dokumen rencana bisnis yang lebih terstruktur, berbasis potensi lokal, serta memuat arah implementasi usaha masing-masing BUMDes. Kegiatan ini berkontribusi terhadap penguatan kapasitas kelembagaan BUMDes secara berkelanjutan melalui peningkatan kemampuan perencanaan, pengelolaan usaha, dan pengambilan keputusan ekonomi desa.

Kata Kunci: BUMDes; perencanaan usaha; Business Model Canvas; penguatan kapasitas; pemberdayaan masyarakat desa

Abstract

Village-Owned Enterprises (BUMDes) are a strategic instrument in rural economic development. However, prior to the implementation of the activity, the main problem faced by partners was the unavailability of systematic, measurable, and appropriate business plan documents in accordance with the village's business potential. This community service program aims to improve the managerial and technical capacity of BUMDes managers in Pesawaran Regency through technical guidance on preparing business plan documents. The activity was held on August 20, 2025, at the Lampung Diniyyah Institute of Technology and Business (INSTIDLA) Campus and was attended by 14 participants from seven BUMDes: Sukabanjar, Bernung, Wiyono, Pampangan, Kalirejo, Taman Sari, and Sungai Langka. The method used was Participatory Action Learning through training, interactive discussions, and direct practice in preparing business plans based on the Business Model Canvas (BMC) and SWOT analysis. The results of the activity showed an average increase in participant understanding of 39.7%, from a pre-test score of 62.5 to a post-test score of 87.3. In addition, participants produced a more structured draft business plan document, based on local potential, and containing the implementation direction for each BUMDes business. This activity contributed to the sustainable strengthening of BUMDes institutional capacity by improving village planning, business management, and economic decision-making skills.

Keywords**:** *BUMDes; business planning; Business Model Canvas; capacity building; village community empowerment*

Jurnal Dedikasi untuk Negeri
Volume 5 Nomor 1, Juli 2026
Universitas Muhammadiyah Lampung
E-ISSN. 2962-9608
http://journal.uml.ac.id/JDN

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen kebijakan yang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara inklusif dan berkelanjutan. Keberadaannya diatur secara formal melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Regulasi dan pedoman teknis BUMDes terus diperkuat, salah satunya melalui Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa, yang menekankan pentingnya akuntabilitas, pencatatan keuangan, dan pelaporan usaha BUMDes secara tertib. BUMDes diharapkan tidak sekadar menjadi unit usaha desa, tetapi bertumbuh sebagai motor penggerak perekonomian lokal yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), dan memperkuat ketahanan ekonomi komunitas pedesaan.

Berbagai studi menunjukkan bahwa sebagian besar BUMDes di Indonesia masih berada pada tahap perkembangan awal dan menghadapi kendala struktural, seperti keterbatasan kapasitas SDM, lemahnya tata kelola, rendahnya literasi keuangan, serta minimnya kemampuan menyusun perencanaan usaha yang sistematis (Febrina et al., 2025). Kondisi serupa ditemukan pada tujuh BUMDes sasaran di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Berdasarkan observasi awal, sebagian besar pengurus masih mengalami kesulitan dalam menyusun anggaran, membuat laporan keuangan berkala, menyusun rencana bisnis tertulis, serta mengelola arsip dokumen secara tertib dan digital.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pencatatan keuangan masih dilakukan secara sederhana, sebatas pemasukan dan pengeluaran, serta belum menjadi rutinitas bulanan. Sebagian BUMDes telah memiliki akta pendirian dan NPWP, tetapi belum seluruhnya memiliki NIB, SOP usaha, dokumen rencana bisnis, dan sistem pengarsipan digital. Kondisi ini menghambat kesiapan BUMDes dalam mengakses pembiayaan, menjalin kemitraan, dan mengembangkan unit usaha berbasis potensi lokal seperti perikanan, jagung, semangka, dan kegiatan ekonomi desa lainnya.

Secara empiris, literasi keuangan terbukti berpengaruh terhadap kesiapan dokumen usaha, sedangkan kesiapan dokumen usaha berpengaruh terhadap efektivitas BUMDes. Namun, literasi keuangan tidak cukup berdampak langsung apabila tidak diterjemahkan ke dalam dokumen administratif yang nyata. Oleh karena itu, pendampingan perlu difokuskan pada penyusunan rencana bisnis, laporan keuangan sederhana, penguatan legalitas, dan digitalisasi arsip agar BUMDes memiliki tata kelola yang lebih akuntabel, terarah, dan berkelanjutan.

Pendekatan pelatihan berbasis praktik dan pendampingan langsung relevan untuk meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes karena penguatan kelembagaan desa tidak hanya membutuhkan transfer pengetahuan, tetapi juga pembelajaran aplikatif yang sesuai dengan konteks usaha desa masing-masing (Said et al., 2021; Yolanda & Darnas, 2025). Program pendampingan BUMDes yang berkelanjutan perlu diarahkan pada penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas manajerial, dan penyusunan dokumen usaha yang sesuai

dengan potensi lokal desa. Pendekatan pelatihan dan pendampingan langsung terbukti relevan dalam memperkuat kapasitas kelembagaan pengelola BUMDes (Zainuri et al., 2023; Aji et al., 2024).

Perencanaan usaha atau *business plan* merupakan fondasi penting dalam pengelolaan BUMDes yang profesional. Dokumen ini berfungsi sebagai peta jalan bisnis yang memuat analisis kondisi internal dan eksternal, penetapan tujuan usaha, strategi operasional, rencana keuangan, serta proyeksi keberlanjutan usaha (Goetha et al., 2023; Supriyanto, 2012). Salah satu pendekatan yang terbukti efektif dalam penyusunan model bisnis yang sistematis adalah *Business Model Canvas* (BMC), yang menggambarkan sembilan elemen kunci bisnis secara visual dan mudah dipahami (Osterwalder & Pigneur, 2010).

Penerapan Business Model Canvas dalam pengembangan BUMDes dapat membantu pengelola memetakan elemen bisnis utama, seperti proposisi nilai, segmen pelanggan, saluran distribusi, sumber pendapatan, dan struktur biaya, sehingga perencanaan usaha desa menjadi lebih sistematis dan mudah (Adhimursandi et al., 2022; Prawijaya, 2022; Susanti et al., 2023).

Sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap penguatan ekonomi desa, Institut Teknologi dan Bisnis Diniyyah Lampung (INSTIDLA) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Dokumen Perencanaan Usaha BUMDes sebagai bagian dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PKM). Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara potensi usaha BUMDes yang cukup besar dengan kondisi tata kelola yang belum sepenuhnya didukung oleh dokumen perencanaan usaha yang terstruktur.

Hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa sejumlah BUMDes telah memiliki unit usaha berbasis potensi lokal, seperti pertanian, perikanan, dan layanan ekonomi desa, tetapi belum seluruhnya memiliki rencana bisnis tertulis, analisis pasar, proyeksi keuangan, SOP usaha, serta dokumen legalitas yang lengkap. Kondisi ini menyebabkan pengembangan usaha BUMDes berjalan kurang terarah, sulit dievaluasi, dan kurang siap mengakses pembiayaan maupun kemitraan eksternal. Oleh karena itu, pelatihan penyusunan dokumen perencanaan usaha dipilih karena intervensi ini lebih mendasar dan aplikatif dibandingkan bantuan modal atau pelatihan umum.

Bantuan modal berisiko kurang optimal apabila BUMDes belum memiliki arah usaha yang jelas, sedangkan pelatihan umum sering kali belum menghasilkan luaran konkret. Melalui Bimtek ini, pengelola BUMDes tidak hanya memperoleh pemahaman, tetapi juga dibimbing untuk menyusun dokumen rencana bisnis yang sesuai dengan potensi desa masing-masing. Kegiatan ini menjadi upaya sinergis antara akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan desa untuk meningkatkan kompetensi pengelola BUMDes dalam merumuskan strategi bisnis yang aplikatif, terukur, berbasis potensi lokal, dan berkelanjutan.

METODE

Kegiatan dilaksanakan pada 20 Agustus 2025 di Kampus Institut Teknologi dan Bisnis Diniyyah Lampung (INSTIDLA), Jalan Ganjaran, Desa Negeri Sakti KM 16, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.

Peserta kegiatan berjumlah 14 orang yang merupakan perwakilan dari tujuh BUMDes di Kabupaten Pesawaran. Setiap BUMDes mengirimkan dua perwakilan yang terdiri atas pengurus inti, Ketujuh BUMDes yang berpartisipasi adalah BUMDes desa Sukabanjar, BUMDes desa Bernung, BUMDes desa Wiyono, BUMDes desa Pampangan, BUMDes desa Kalirejo, BUMDes desa Taman Sari, dan BUMDes desa Sungai Langka.

Kegiatan ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Learning* (PAL), yang menempatkan peserta sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran, bukan sekadar penerima informasi. Pendekatan Participatory Action Learning (PAL) dipilih karena pengurus BUMDes perlu belajar melalui praktik langsung, bukan hanya menerima materi. Peserta memiliki latar belakang dan kemampuan administrasi yang beragam, sehingga perlu dilibatkan aktif dalam mengenali masalah, memetakan dokumen, menyusun rencana bisnis, dan mencatat keuangan agar hasil pendampingan lebih aplikatif dan bermanfaat.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pendampingan BUMDes yang berpusat pada praktik nyata dan refleksi bersama (Zainuri et al., 2023; Raharjo & Lestari, 2023). Tahapan pelaksanaan meliputi:

a. Analisis kebutuhan dan orientasi program
b. Pelatihan teknis (Bimtek) berupa penyampaian materi konseptual, regulatif, dan praktis mengenai perencanaan BUMDes
c. Simulasi dan praktik langsung penyusunan rencana bisnis berbasis *Business Model Canvas* dan analisis SWOT
d. Evaluasi dan refleksi melalui pre-test dan post-test serta diskusi tindak lanjut

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta sebelum dan sesudah mengikuti Bimtek. Instrumen evaluasi terdiri atas 20 butir soal pilihan ganda dengan empat pilihan jawaban. Setiap jawaban benar diberi skor 5 dan jawaban salah diberi skor 0, sehingga rentang nilai peserta berada pada skala 0 sampai 100.

Indikator yang diukur meliputi: pemahaman dasar tentang fungsi dan tata kelola BUMDes, kemampuan mengenali komponen dokumen perencanaan usaha, pemahaman terhadap Business Model Canvas, pemahaman analisis SWOT, dasar penyusunan proyeksi keuangan sederhana, serta pentingnya legalitas dan pengarsipan dokumen usaha. Pre-test diberikan sebelum penyampaian materi untuk mengetahui kemampuan awal peserta, sedangkan post-test diberikan setelah kegiatan praktik dan diskusi untuk mengetahui peningkatan pemahaman. Peningkatan kemampuan peserta dihitung dengan membandingkan nilai rata-rata pre-test dan post-test. Rumus yang digunakan adalah:

Peningkatan (%) = [(Nilai rata-rata post-test - Nilai rata-rata pre-test) / Nilai rata-rata pre-test] × 100%.

Pemateri terdiri atas akademisi dan praktisi berpengalaman di bidang pengembangan BUMDes. Materi terdiri dari Regulasi BUMDes, Pemetaan Potensi Desa, dan Konsep Dasar Perencanaan BUMDes, *Business Model Canvas* dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Usaha BUMDes, dan Analisis Kelayakan Usaha dan Aspek Finansial BUMDes.

Jurnal Dedikasi untuk Negeri
Volume 5 Nomor 1, Juli 2026
Universitas Muhammadiyah Lampung
E-ISSN. 2962-9608
http://journal.uml.ac.id/JDN



Gambar 1. *Bagan Alur Pelaksanaan Kegiatan*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan pelatihan partisipatif mampu mendorong keterlibatan aktif pengurus BUMDes dalam proses peningkatan kapasitas kelembagaan. Tingkat partisipasi peserta yang mencapai 100% tidak hanya menunjukkan keberhasilan teknis pelaksanaan kegiatan, tetapi juga mencerminkan adanya kebutuhan nyata dari pengelola BUMDes terhadap penguatan kemampuan manajerial dan penyusunan dokumen perencanaan usaha.

Dalam perspektif pemberdayaan masyarakat, partisipasi aktif merupakan elemen penting karena masyarakat atau pengelola lembaga lokal tidak ditempatkan sebagai objek program, tetapi sebagai subjek yang terlibat dalam mengenali masalah, merumuskan solusi, dan menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, antusiasme peserta pada sesi praktik Business Model Canvas dapat dimaknai sebagai bentuk peningkatan kesadaran kritis dan kemampuan pengambilan keputusan dalam pengelolaan usaha desa.

Secara konseptual, hasil kegiatan ini juga selaras dengan pendekatan capacity building, yang menekankan pentingnya peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan kelembagaan agar organisasi mampu menjalankan fungsinya secara lebih efektif. Draft dokumen perencanaan usaha yang dihasilkan oleh masing-masing BUMDes menunjukkan bahwa pelatihan tidak berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi telah bergerak pada penguatan kapasitas aplikatif. Peserta tidak hanya memahami konsep perencanaan usaha, tetapi mulai mampu mengidentifikasi potensi lokal, menyusun analisis SWOT, merumuskan segmen pelanggan, menentukan proposisi nilai, serta memperkirakan struktur biaya dan sumber pendapatan. Hal ini penting karena efektivitas BUMDes sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengurus dalam menerjemahkan potensi desa menjadi rencana bisnis yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Dari sudut pandang pengembangan kelembagaan BUMDes, kegiatan ini memperkuat aspek tata kelola melalui penyusunan dokumen perencanaan yang lebih sistematis. Sebelum kegiatan, perencanaan usaha BUMDes cenderung masih bersifat umum dan belum didukung oleh analisis pasar, proyeksi keuangan, maupun strategi operasional yang jelas.

Setelah pelatihan dan pendampingan, peserta mulai menghasilkan dokumen yang lebih

terstruktur dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, pengajuan pembiayaan, serta pengembangan kemitraan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelatihan penyusunan dokumen perencanaan usaha merupakan bentuk intervensi yang relevan karena menjawab akar persoalan kelembagaan, yaitu lemahnya perencanaan, administrasi, dan kesiapan dokumen usaha.

Temuan ini juga sejalan dengan hasil kajian pada BUMDes di Kabupaten Pesawaran yang menunjukkan bahwa kesiapan dokumen usaha berperan penting dalam meningkatkan efektivitas BUMDes, sedangkan literasi keuangan akan lebih bermakna apabila diterjemahkan ke dalam praktik administrasi dan dokumen kelembagaan yang nyata.

Keterlibatan narasumber yang memiliki latar belakang akademis dan pengalaman pendampingan lapangan turut memperkuat proses pembelajaran. Kombinasi antara pengetahuan konseptual dan pengalaman praktis membuat materi lebih mudah dipahami dan relevan dengan kondisi peserta. Hal ini mendukung pandangan bahwa penguatan kapasitas BUMDes membutuhkan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan praktisi pendamping. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menghasilkan capaian administratif berupa draft dokumen perencanaan usaha, tetapi juga berkontribusi pada proses pemberdayaan pengurus BUMDes melalui peningkatan kapasitas, kemandirian, dan kesiapan kelembagaan dalam mengelola usaha desa secara lebih profesional.

Peserta memberikan tanggapan sangat positif terhadap penyampaian materi yang sistematis dan aplikatif. Mereka mengapresiasi kehadiran narasumber yang tidak hanya memiliki latar belakang akademis, tetapi juga berpengalaman dalam pendampingan BUMDes secara langsung, sehingga materi lebih mudah dipahami dan langsung dapat diterapkan di desa masing-masing. Hal ini konsisten dengan temuan Raharjo dan Lestari (2023) yang menekankan pentingnya keterlibatan akademisi-praktisi dalam program penguatan kapasitas BUMDes.

Evaluasi melalui pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan rata-rata pemahaman peserta sebesar 39,7%, dari nilai 62,5 pada pre-test menjadi 87,3 pada post-test. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kegiatan Bimtek tidak hanya menambah pengetahuan peserta secara kuantitatif, tetapi juga memperkuat kompetensi praktis dalam memahami regulasi BUMDes, memetakan potensi usaha desa, menyusun Business Model Canvas, menganalisis kelayakan usaha, serta menyusun dokumen perencanaan bisnis.

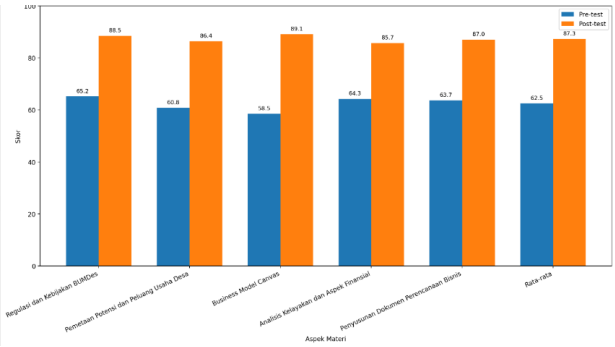
Kenaikan tertinggi terdapat pada aspek Business Model Canvas sebesar 52,3%, yang mengindikasikan bahwa peserta semakin mampu merumuskan model usaha secara lebih terarah, mulai dari segmen pelanggan, nilai produk, sumber pendapatan, hingga struktur biaya. Peningkatan pada aspek pemetaan potensi dan peluang usaha desa sebesar 42,1% juga menunjukkan bahwa peserta lebih mampu mengenali potensi lokal sebagai dasar pengembangan unit usaha BUMDes. Dengan demikian, hasil evaluasi ini bermakna bahwa peserta tidak hanya memahami materi secara teoritis, tetapi mulai memiliki kemampuan aplikatif untuk menyusun dokumen usaha yang

Jurnal Dedikasi untuk Negeri
Volume 5 Nomor 1, Juli 2026
Universitas Muhammadiyah Lampung
E-ISSN. 2962-9608
http://journal.uml.ac.id/JDN

lebih sistematis dan sesuai kebutuhan BUMDes masing-masing.

Tabel 1. *Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pre-test dan Post-test*

No	Aspek Materi	Pre-test	Post-test	Selisih Skor	Kenaikan Relatif
1	Regulasi dan Kebijakan BUMDes	65,2	88,5	23,3	35,7%
2	Pemetaan Potensi dan Peluang Usaha Desa	60,8	86,4	25,6	42,1%
3	Business Model Canvas	58,5	89,1	30,6	52,3%
4	Analisis Kelayakan dan Aspek Finansial	64,3	85,7	21,4	33,3%
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Bisnis	63,7	87,0	23,3	36,6%
	Rata-rata	62,5	87,3	24,8	39,7%



Gambar 2. *Hasil Evaluasi Pre-test dan Post-test*

Peningkatan yang paling signifikan terjadi pada aspek pemahaman Business Model Canvas sebesar 30,6 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan visual dan praktis melalui BMC efektif bagi pengelola BUMDes yang umumnya belum memiliki latar belakang bisnis formal. Sebelum pelatihan, dokumen perencanaan usaha peserta umumnya masih bersifat deskriptif, belum memuat pemetaan segmen pelanggan, proposisi nilai, saluran pemasaran, struktur biaya, sumber pendapatan, maupun analisis risiko secara jelas. Misalnya, rencana usaha hanya ditulis dalam bentuk uraian singkat tentang jenis usaha desa, tanpa perhitungan kebutuhan modal, target pasar, proyeksi pendapatan, dan strategi pemasaran.

Setelah pelatihan, dokumen yang disusun peserta menjadi lebih sistematis karena telah dilengkapi dengan BMC, analisis SWOT, identifikasi potensi desa, segmentasi pelanggan, rencana operasional, estimasi biaya, proyeksi pendapatan, serta rencana tindak lanjut.

Perubahan kualitas dokumen perencanaan usaha terlihat secara nyata dari perbandingan sebelum dan sesudah pelatihan. Sebelum pelatihan, dokumen yang dimiliki peserta umumnya masih berupa uraian sederhana tentang jenis usaha BUMDes, misalnya hanya mencantumkan rencana pengembangan usaha perikanan, pertanian jagung, atau perdagangan desa tanpa penjelasan yang rinci mengenai target pasar, kebutuhan modal, strategi pemasaran, struktur biaya, proyeksi pendapatan, maupun risiko.

Setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan, dokumen tersebut menjadi lebih sistematis karena peserta mulai mampu menyusun profil usaha, memetakan potensi desa, mengidentifikasi segmen pelanggan, merumuskan nilai produk, menyusun analisis SWOT, menghitung kebutuhan biaya awal, memperkirakan sumber pendapatan, serta

menetapkan rencana tindak lanjut. Misalnya, gagasan usaha yang sebelumnya hanya ditulis sebagai "pengembangan budidaya ikan" berubah menjadi rencana bisnis yang memuat sasaran pasar, kebutuhan pakan dan bibit, estimasi biaya produksi, perkiraan hasil panen, strategi penjualan, dan peluang kerja sama dengan mitra lokal. Dengan demikian, pelatihan tidak hanya meningkatkan pengetahuan teoritis, tetapi juga memperbaiki mutu dokumen perencanaan usaha dari yang semula bersifat umum menjadi lebih terarah, terukur, dan siap digunakan sebagai dasar pengembangan unit usaha, pengajuan pembiayaan, maupun kerja sama kelembagaan.

Temuan ini selaras dengan Sulastri et al. (2022) yang menyatakan bahwa pelatihan *Business Model* Canvas berbasis pendampingan langsung dapat meningkatkan kemampuan kelompok usaha berbasis komunitas dalam merancang model bisnis secara lebih aplikatif.

Kegiatan Bimtek ini tidak hanya berdampak pada bertambahnya pengetahuan peserta, tetapi juga menumbuhkan kesadaran baru di kalangan pengurus BUMDes tentang pentingnya tata kelola usaha yang lebih tertib, terarah, dan berkelanjutan. Dalam jangka pendek, peserta mulai memahami bahwa rencana bisnis, pemetaan potensi desa, analisis kelayakan, dan dokumen usaha bukan sekadar administrasi, tetapi menjadi alat bantu untuk mengelola usaha desa secara lebih baik.

Melalui proses diskusi dan praktik, peserta dapat melihat bahwa gagasan usaha yang selama ini masih bersifat umum dapat disusun menjadi rencana yang lebih jelas, mulai dari tujuan usaha, kebutuhan modal, target pasar, hingga strategi pengembangannya.

Dalam jangka menengah, dokumen perencanaan yang telah disusun dapat menjadi pegangan bagi BUMDes dalam menentukan prioritas usaha, mengelola sumber daya, memperbaiki pencatatan, serta mempersiapkan diri untuk mengakses pembiayaan, program pemerintah, maupun kerja sama dengan mitra. Sementara itu, dalam jangka panjang, kegiatan ini berpotensi memperkuat kemandirian BUMDes karena pengurus memiliki bekal untuk mengambil keputusan secara lebih rasional, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan tata kelola yang lebih baik, BUMDes diharapkan mampu menjalankan peran ekonomi desa secara lebih konsisten dan memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Secara institusional, kegiatan ini juga mempererat hubungan antara INSTIDLA, BUMDes, pemerintah desa, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran. Hubungan ini penting karena penguatan BUMDes tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, tetapi membutuhkan pendampingan, jejaring, dan ruang belajar bersama. Dukungan terhadap rencana coaching clinic, forum konsultasi bisnis desa, serta gagasan pembentukan Forum Komunikasi BUMDes Pesawaran menunjukkan bahwa peserta mulai menyadari pentingnya kolaborasi antardesa.

Pola kemitraan ini konsisten dengan model pendampingan strategis yang dikembangkan oleh Harbi et al. (2025), di mana keterlibatan perguruan tinggi secara berkelanjutan terbukti menghasilkan pengembangan kapasitas BUMDes yang lebih terukur dan berdampak nyata. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi

langkah awal untuk membangun ekosistem BUMDes yang saling belajar, saling menguatkan, dan lebih siap berkembang secara berkelanjutan.

Jika dibandingkan dengan kegiatan sejenis di daerah lain, Bimtek di Pesawaran memiliki kelebihan pada pendekatan yang lebih integratif dan aplikatif. Program pelatihan BUMDes di Baumata, NTT (Goetha et al., 2023) lebih menekankan perencanaan bisnis dasar, sedangkan kegiatan di Kutai Kartanegara (Adhimursandi et al., 2022) telah menggunakan Business Model Canvas, tetapi belum sepenuhnya mengaitkannya dengan analisis kelayakan finansial dan kesiapan dokumen usaha.

Kelebihan kegiatan di Pesawaran bukan hanya terletak pada kelengkapan materi, tetapi pada cara materi tersebut dirancang sebagai satu kesatuan proses belajar. Peserta tidak hanya memahami regulasi, menyusun BMC, dan menghitung kelayakan usaha secara terpisah, tetapi diarahkan untuk menghubungkan ketiganya ke dalam dokumen perencanaan usaha yang dapat digunakan oleh BUMDes masing-masing. Pendekatan ini lebih kuat karena menjawab kelemahan utama BUMDes, yaitu kesenjangan antara potensi usaha desa dengan rendahnya kemampuan administratif dan manajerial pengurus.

Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga transformatif karena menghasilkan luaran praktis berupa draft rencana bisnis, pemetaan potensi, analisis SWOT, struktur biaya, proyeksi pendapatan, dan rencana tindak lanjut. Secara kritis, pendekatan terpadu ini lebih relevan dibandingkan pelatihan yang hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan, sebab efektivitas BUMDes sangat bergantung pada kemampuan pengurus menerjemahkan pengetahuan menjadi dokumen perencanaan yang konkret, terukur, dan siap digunakan untuk pengambilan keputusan, pengajuan pembiayaan, serta pengembangan kemitraan.

Lebih lanjut, pendekatan PAL yang digunakan dalam kegiatan ini juga lebih partisipatif dibandingkan metode ceramah atau workshop tunggal yang banyak digunakan dalam program sejenis. Hal ini sejalan dengan rekomendasi Raharjo dan Lestari (2023) bahwa program pengembangan kapasitas BUMDes yang efektif perlu mengadopsi pendekatan pembelajaran berbasis praktik yang kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Kendala utama yang dihadapi berupa keterbatasan waktu pelaksanaan yang berlangsung dalam satu hari, serta heterogenitas kapasitas dasar peserta dari berbagai latar belakang pendidikan dan pengalaman. Tim pelaksana mengatasinya dengan menyediakan modul digital pelatihan yang komprehensif, template dokumen perencanaan usaha yang dapat diunduh dan disesuaikan, serta membuka kanal konsultasi daring pasca kegiatan melalui grup komunikasi digital. Pendekatan ini memastikan kesinambungan pembinaan setelah kegiatan formal berakhir, sejalan dengan prinsip keberlanjutan program pengabdian kepada masyarakat (Susanti et al., 2023).

Jurnal Dedikasi untuk Negeri
Volume 5 Nomor 1, Juli 2026
Universitas Muhammadiyah Lampung
E-ISSN. 2962-9608
http://journal.uml.ac.id/JDN







Gambar 3. *Kegiatan Pemberian materi*

KESIMPULAN

Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Usaha BUMDes menunjukkan bahwa penguatan kapasitas BUMDes perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada kemampuan menghasilkan dokumen kerja yang dapat digunakan secara nyata. Melalui pendekatan Participatory Action Learning, peserta terlibat aktif dalam memetakan potensi desa, menyusun Business Model Canvas, menganalisis kelayakan usaha, dan menghasilkan draft rencana bisnis sesuai kebutuhan masing-masing BUMDes. Hal ini menegaskan bahwa dokumen perencanaan bukan sekadar kelengkapan administratif, tetapi menjadi dasar pengambilan keputusan, akses pembiayaan, pengembangan kemitraan, dan keberlanjutan usaha desa.

Secara kelembagaan, kegiatan ini menjadi langkah awal untuk membangun tata kelola BUMDes yang lebih tertib, terarah, dan akuntabel. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menindaklanjuti kegiatan ini melalui pendampingan berkelanjutan, seperti klinik bisnis BUMDes, asistensi legalitas usaha, pelatihan laporan keuangan sederhana, monitoring implementasi rencana bisnis, dan pembentukan forum komunikasi BUMDes. Perguruan tinggi juga perlu melembagakan pendampingan melalui pengabdian berkelanjutan, KKN tematik, riset terapan, dan inkubasi bisnis desa agar penguatan BUMDes berlangsung lebih konsisten dan berdampak jangka panjang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Diniyyah Lampung (INSTIDLA) atas dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Apresiasi mendalam juga disampaikan kepada pengurus tujuh BUMDes peserta

dari Sukabanjar, Bernung, Wiyono, Pampangan, Kalirejo, Taman Sari, dan Sungai Langka atas partisipasi aktif dan antusiasme yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Aji, J. S., Pahlevi, R. W., & Hayati, K. (2024). Strengthening the capacity of BUMDes Astaguna Trihanggo Village in facing the Industrial Revolution 4.0. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 6(3), 641–648.* https://doi.org/10.20527/btjpm.v6i3.10151

Adhimursandi, D., Haribowo, R., Heksarini, A., & Azis, M. (2022). Bumdes business planning with canvas business model in the village agreed Kutai Kartanegara: Perencanaan bisnis BUMDes dengan kanvas model bisnis di Desa Sepakat Kutai Kartanegara. *Indonesian Journal of Engagement, Community Services, Empowerment and Development, 2(1), 13–18.* https://doi.org/10.53067/ijecsed.v2i1.39

Febrina, R., Marta, A., Muhammad Amin, R., Hadi, S., Ferlan, M., & Essio Mento, M. (2025). Penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berbasis Kampung Hijau. *Abdimas Indonesian Journal, 5(1), 313–324.* https://doi.org/10.59525/aij.v5i1.624

Goetha, S., Sinlae, A. J., Nani, P. A., Amaral, M. A. L., & Ketmoen, A. (2023). Pelatihan perencanaan bisnis bagi BUMDes di Baumata. BERNAS: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(1), 355–359.* https://doi.org/10.31949/jb.v4i1.4043

Harbi, J., Nizar, M., Ma'ruf, I., Kurniawan, R., Harmilia, E. D., Fahmi, I. A., & Puspitasari MZ, R. (2025). Strategic assistance for strengthening the capacity of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Musi Banyuasin District: Transformasi kapasitas kelembagaan BUMDes di Kabupaten Musi Banyuasin melalui pendampingan intensif dan kemitraan bisnis. *Altifani Journal: International Journal of Community Engagement, 5(2), 9–17.* https://doi.org/10.32502/altifani.v5i2.613

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2022). Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Maulana, A., Novalia, N., Rosa, A., & Yunita, D. (2022). Pemberdayaan peningkatan kapasitas wirausaha desa melalui pelatihan pembuatan rencana bisnis. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(3), 133–142.* https://doi.org/10.35912/yumary.v2i3.674

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. New Jersey: John Wiley & Sons.

Prawijaya, A. (2022). Strategi Bisnis Business Model Canvas pada Bumdes-Mart Berkah. *Perspektif, 11(1), 322–333.* https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5371

Said, M., Asmorowati, S., & Wijaya, A. F. (2021). Capacity building of village-owned enterprises in strengthening village economy. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research. Atlantis Press.* https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210928.028

Sari, N. A., Mandala, W., & Hendrawan, D. A. (2022). Penyuluhan kewirausahaan dan workshop perencanaan bisnis menggunakan Business Model Canvas di SMK Negeri 1 Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. *Literasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Inovasi, 2(2), 1256–1267.*

Sulastri, S., Adam, M., Saftiana, Y., Nailis, W., & Putri, Y. H. (2022). Pelatihan dan pendampingan penyusunan rencana bisnis model kanvas bagi usaha mikro kecil dan menengah. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), 6(1), 121–132.* https://doi.org/10.31764/jmm.v6i1.6120

Supriyanto. (2012). Business plan sebagai langkah awal memulai usaha. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, 6(1), 73–83.* https://doi.org/10.21831/jep.v6i1.590

Susanti, S., Rusdinal, R., & Firman, F. (2023). Model Bisnis Canvas dalam upaya meningkatkan kinerja BUMDes. *Prosiding Seminar Nasional ADPI Mengabdi untuk Negeri, 4(1), 79–84.* https://doi.org/10.47841/semnasadpi.v4i1.102

Yolanda, R., & Darnas, Y. (2025). Building capacity of village owned enterprises administrators through training in Cianjur Regency. *Indonesian Journal of Social Responsibility Review, 4(1), 65–73.* https://doi.org/10.55381/ijsrr.v4i1.373

Zainuri, Z., Fathorrazi, M., & Prianto, F. W. (2023). Implementasi prinsip Good Governance melalui pelatihan dan pendampingan peningkatan capacity building pada pengelolaan BUMDes Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. LOYALITAS: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 6(2).* https://doi.org/10.30739/loyalitas.v6i2.2597